

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PERIKANAN



TAHUN ANGGARAN
2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Tahun 2023 ini dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari Dinas Perikanan sebagai instansi Pemerintah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Malinau yang meliputi 2(dua) bidang yaitu Bidang Usaha Perikanan dan Bidang Perikanan Budidaya. Pelaksanaan kegiatan tersebut, berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Malinau Tahun 2023, masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian diharapkan agar dapat bermanfaat bagi kita dalam membangun sektor Perikanan di Kabupaten Malinau untuk mewujudkan perikanan yang modern, tangguh dan efisien menuju masyarakat petani yang sejahtera.

Kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, saran dan pendapat untuk penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan
Muhammad Kadri, S.Sos, M.Si
NIP. 19670717 199803 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau, Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah 326,29 % yang dapat dilihat pada tabel rencana eksekutif (RE) 1:

Tabel Rencana Eksekutif (RE) 1
Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	193	258,82	134,10
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	72	138,38	192,19
Rata-Rata Capaian Kinerja					163,14

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	3
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Sumber Daya Manusia Aparatur	6
F. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi.....	7
G. Sistematika Penyajian	8
BAB II. Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.....	10
1. Tujuan dan sasaran.....	11
2. Indikator Kinerja.....	12
3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
4. Program.....	14
B. Rencana Kinerja Tahunan	15
C. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III. Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Analisis Capaian Kinerja	19
C. Realisasi Anggaran	20
BAB IV. Penutup	
LAMPIRAN :	
1. PK Kepala OPD	

2. Laporan Triwulan IV IKU
3. Penghargaan yang diterima OPD
4. Photo2 Kegiatan yang Terkait IKU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah No .4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perikanan dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di bidang perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 306 Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraantempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
2. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan

yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh Bupati.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 , Pasal 306 Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Malinau Periode 2021-2026 adalah “ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di dukung Pemerintahan yang Profesional “. Visi yang di tetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Malinau dengan potensi besar dan Tingkat keragaman yang tinggi harus mampu dibangun menuju Masyarakat yang maju dan Sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafat Pelangi.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, ada 4 (Empat) misi yang harus dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari falsafah pelangi, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi Pelaksana dari misi ke 2 (dua) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal”.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, telah disusun program prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun ke depan (2021 – 2026) yang terdiri dari 5 (Lima) program utama diantaranya yaitu :

1. Program Desa Sarjana
2. Program Milenial Mandiri
3. Program Rasda Plus
4. Program RT Bersih
5. Program WM Malinau Maju (Wajib Belajar, Malinau Maju)

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dengan asumsi menopang “Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan

(Goal)" pada tahun 2021 - 2026 dari sektor perikanan didukung pagu dana indikatif sesuai kebutuhan.

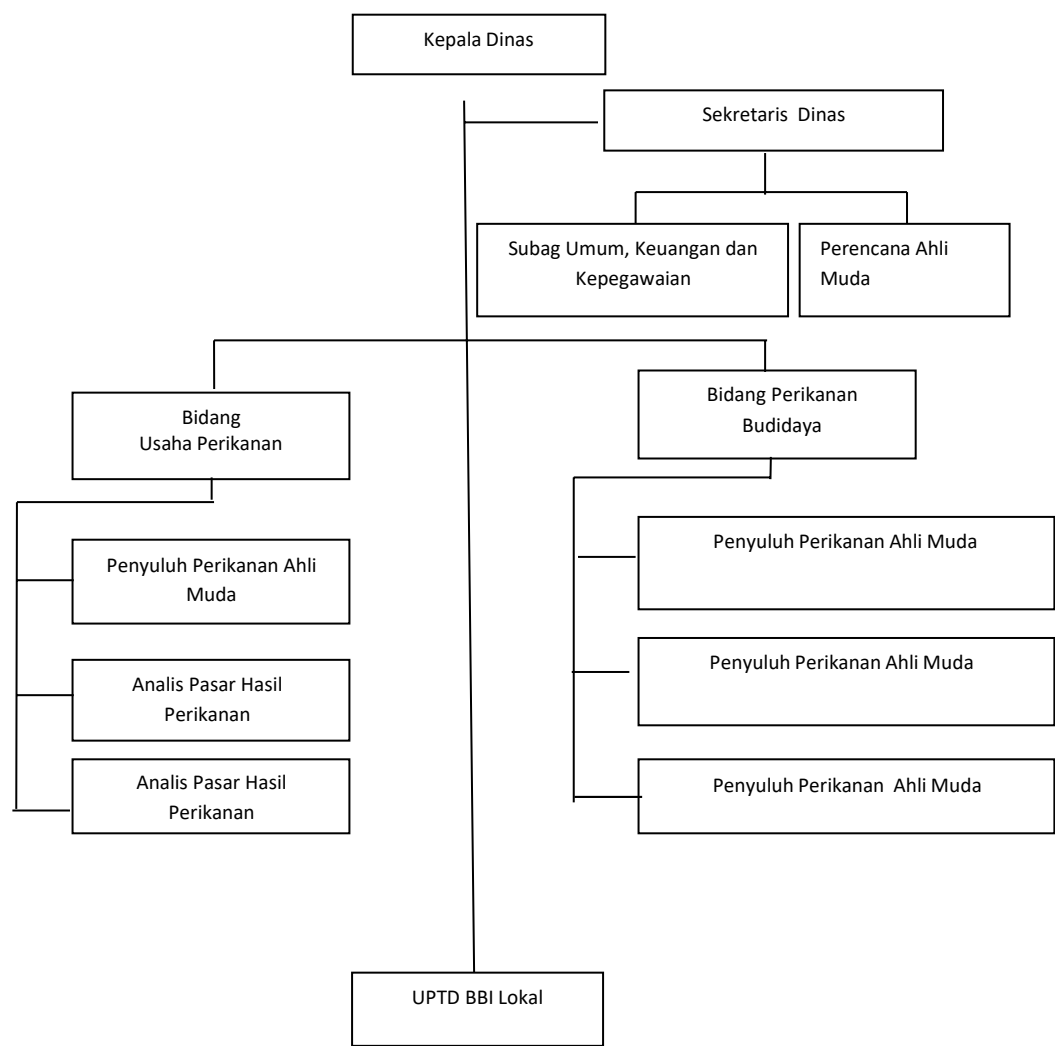
D. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
 - b. Perencana Ahli Muda
3. Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a. Penyuluh perikanan ahli muda
 - b. Analis pasar hasil ikan
 - c. Analis pasar hasil ikan
4. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Penyuluh perikanan ahli muda
 - b. Penyuluh perikanan ahli muda
 - c. Penyuluh perikanan ahli muda
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Bagan dan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1



E. Sumber Daya Manusia

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau per 31 Desember 2023 memiliki sumberdaya manusia aparatur sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS dan PPT Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	SLTA	5	-	5
3.	Sarjana Muda(D-3)	5	-	5
4.	Sarjana (S-1)	14	-	14
5.	Sarjana (S-2)	6	-	6
Jumlah				30

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel 1.2, terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perikanan sebagian besar berpendidikan Strata Satu (Sarjana/S1) sebanyak 14 orang, SLTA sederajat sebanyak 5 orang, Sarjana (S2) sebanyak 6 Orang, dan Sarjana Muda (D-3) sebanyak 5 Orang. Berdasar jenjang pendidikan tersebut menunjukkan bahwa SDM Aparatur Dinas Perikanan masih kekurangan tenaga staf untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan berdasarkan tingkat Golongan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan II	6
2.	Golongan III	19
3.	Golongan IV	3
Jumlah		28

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2023

Dilihat dari tabel 1.3 di atas, jumlah PNS berdasarkan golongan tersebut di atas, golongan II sebanyak 6 (enam) orang, golongan III sebanyak 19 (sembilan belas) orang, golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang. Di samping jumlah PNS yang memiliki tingkat pendidikan juga telah mengikuti diklat kepemimpinan.

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah PNS Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Yang Telah Mengikuti Diklat Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Diklat PIM II	1
2.	Diklat PIM III	3
3.	Diklat PIM IV	6
4.	Pejabat yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuaiJabatannya	3

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2023

Dilihat dari tabel 1.4 jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat PIM II sebanyak1 (satu) orang, PIM III sebanyak 3 (tiga) orang, dan PIM IV sebanyak 6 (enam) orang, sebanyak 1

orang Pejabat Eselon IV belum mengikuti Diklat Kepemimpinan IV dan sebanyak 1 orang pejabat fungsional yang belum sempat mengikuti Diklat kepemimpinan IV. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat, maka Diklat Kepemimpinan wajib diikuti.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan yang memiliki jabatan eselon dapat dilihat pada tabel 1.5 :

Tabel 1.5
Jumlah PNS Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Berdasarkan Eselon
Tahun 2023

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	Eselon II b	1
2.	Eselon III a	1
3.	Eselon III b	2
4.	Eselon IV a	1
5.	Jafung	8
	Jumlah	13

Sumber : Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Tahun 2023

F. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Kabupaten Malinau dengan bentang alam yang sangat luas merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau untuk mengembangkan dan meningkatkan target pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Peluang tersebut jika didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada nelayan dan pembudidaya ikan; tersedianyasumber daya perikanan yang andal dan profesional; tersedianya prasarana dan sarana perikanan yang mencukupi; lingkungan kerja yang sehat; minat dan kemauan yang besar dari masyarakat dalam pengembangan usaha di bidang perikanan.

Dinas Perikanan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016, mengemban tugas sesuai asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/tantangan yang dihadapi, terlebih keberadaan Dinas Perikanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk tentu memerlukan pembenahan Internal organisasi, untuk mengetahui hal tersebut, perlu diadakan analisis terhadap keberadaan SKPD itu sendiri.

Analisis internal Dinas Perikanan Kabupaten Malinau memiliki kekuatan

(*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan yang dimiliki SKPD yaitu :

- a. Memiliki sumber daya lahan perikanan yang cukup potensial;
- b. Memiliki struktur organisasi yang jelas;
- c. Dukungan dana;
- d. Tersedianya data dasar perikanan;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana.

Dibalik kekuatan yang dimiliki, di sisi yang lain juga mempunyai kelemahan antara lain:

- a. Alih fungsi lahan yang cenderung meningkat;
- b. Belum lengkapnya standar operasional prosedur;
- c. Lemahnya manajemen pengelolaan data;
- d. Masih lemahnya koordinasi;
- e. Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan.

Melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki SKPD, tantangan/hambatan dapat diatasi dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan mereduksi kelemahan, untuk meraih peluang dalam rangka pengembangan pelayanan SKPD. Peluang yang dapat diraih antara lain :

1. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik Aparatur Sipil Negara maupun Nelayan Kecil melalui diklat, bimbingan teknis, kursus dan sejenisnya;
2. Mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan (BBI), Kawasan Minapolitan serta potensi lahan perikanan yang ada dengan didukung rekayasa teknologi pakan buatan/pakan mandiri yang bermutu;
3. Merekrut generasi muda untuk mau menekuni perikanan dengan memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan dalam menekuni usaha perikanan;
4. Meningkatkan sarana/prasarana untuk memperlancar transportasi hasil-hasil perikanan;
5. Meningkatkan kuantitas benih ikan dan mutu benih ikan dan pengolahan hasil-hasil perikanan yang lebih variatif dan higienis;
6. Mempermudah akses ke sumber-sumber pembiayaan dan akses pemasaran serta jaminan harga.

Dengan dukungan *stakeholder* dan *political will* dari pemerintah, maka tantangan akan dapat diatasi dan peluang pengembangan pelayanan SKPD ke depan dapat diupayakan secara optimal. Adapun yang menjadi Permasalahan saat ini adalah

- a. Biaya Pakan

Pakan ikan seringkali merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam

budidaya perikanan. Harga pakan ikan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku dan proses produksi pakan.

b. Biaya Bibit

Biaya untuk memperoleh bibit ikan atau benih merupakan faktor penting dalam produksi perikanan. Bibit yang baik seringkali memerlukan investasi yang signifikan.

c. Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan

Ketersediaan tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan yang sesuai untuk industri pengolahan hasil perikanan mungkin terbatas. Pelatihan dan pendidikan yang kurang dapat membatasi kemampuan individu untuk berkontribusi pada pengolahan hasil perikanan dengan efektif.

d. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Tidak Efektif:

Kurangnya kebijakan pengelolaan perikanan yang efektif dan implementasi yang buruk dapat menyebabkan penurunan stok ikan dan ketidakberlanjutan sumber daya perikanan.

e. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ikan:

Penyakit yang menyerang ikan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi budidaya perikanan.

f. Infrastruktur dan Teknologi:

Kurangnya infrastruktur yang memadai dan adopsi teknologi dalam kegiatan perikanan dapat menghambat peningkatan produktivitas dan efisiensi.

g. Pelatihan dan Pengembangan Keahlian:

Keterbatasan pelatihan dan pengembangan keahlian bagi nelayan dapat membatasi kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan teknologi dan praktik perikanan yang berkelanjutan.

h. Pemasaran dan Akses Pasar

Kesulitan dalam pemasaran produk perikanan dan akses ke pasar yang terbatas dapat menjadi kendala ekonomi bagi nelayan dan produsen perikanan lokal.

i. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi lingkungan perairan, termasuk suhu air dan pola cuaca, yang dapat berdampak pada produktivitas perikanan.

j. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dapat mendukung kegiatan ilegal di sektor perikanan, mengancam keberlanjutan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi daerah, salah satunya mungkin dapat ditempuh dengan menekan biaya produksi serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pembudidaya serta menggencarkan promosi.

G. Sistematika Penyajian

Pelaporan kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dan analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2023. Rencana analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan berpedoman pada Peraturan MenteriPemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja : pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja :

A. Capaian Kinerja Organisasi :

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi;

B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kineja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaanstrategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada);

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan berakhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampk (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuandan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yakni misi ke-2, Yaitu "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal".

Adapun sasaran dalam pelaksanaan misi ini, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mendukung sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Perikanan yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang dilaksanakan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang perikanan. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Malinau "Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional", maka tujuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dituangkan dalam pernyataan meningkatnya hasil perikanan untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Malinau.

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi Pelaksana dari misi ke-2 (dua) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal".

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Malinau periode 2021 – 2026 adalah Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintah yang Profesional. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Malinau dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang maju dan sejahtera .

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, ada 4 (Empat) misi yang harus dilaksanakan, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi Pelaksana dari misi ke 2 (dua) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Perikanan perlu ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan selama kurun lima tahun sesuai dengan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke –					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	68	70	72	74	76	78
			Produksi Perikanan Budidaya(Ton)	175	184	193	202	212	222

Sumber : Data Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya

2. Indikator Kinerja

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa setiap SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perikanan telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

- a. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
- b. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran yaitu : "Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan"

Dengan melalui 1 (satu) strategi yaitu : "Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan".

Untuk melaksanakan strategi dan mencapai tujuan serta sasaran ditempuh melalui 1 (satu) arah kebijakan yaitu pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas

pelaku usaha perikanan.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan SasaranRPJMD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Data
1	Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Budidaya Perikanan}}{\text{Jumlah Target Produksi Budidaya Perikanan}} \times 100\%$
			Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Jumlah Target Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100\%$

Sumber : Data perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya

Untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja utama yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tentu sangat memerlukan dukungan sarana prasarana pendukung seperti meningkatnya penerapan teknologi perikanan; meningkatnya produksi perikanan meningkatnya penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk serta meningkatnya jumlah dan pemeliharaan/perbaikan infrastruktur perikanan. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama SKPD yang telahditetapkan lewat IKU di atas, tentu saja tidak boleh lepas dari sasaran dan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021 – 2026 yang telah ditetapkan lewat Peraturan Daerah, karena pada dasarnya penyusunan Rencana Strategis SKPD wajib mengacu kepada RPJMD.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III di depan, bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan Misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026, "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal". Salah satu tujuan yang berkaitan dengan indikator kinerja utama SKPD adalah Meningkatnya Nilai tambah dan pendapatan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan.

Indikator Kinerja Utama yang mengacu kepada sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan (Rencana Strategis SKPD), juga telah mengacu kepada sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang berbunyi Mengembangkan Produk Unggulan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara hierarki, Indikator Kinerja Utama SKPD, sepenuhnya telah mengacu kepada sasaran yang telah ditetapkan

oleh SKPD maupun telah mengakomodir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021 – 2026.

3. Strategi dan Arah Kebijakan
- Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan selama lima tahun dapat dilihat dalam tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional		
Misi 2	:	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang BerbasisPotensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, Sarana dan Prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan	Pengembangan,perbaik an dan pemanfaatan sarana dan prasarana Perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau 2021 - 2026, maka Dinas Perikanan perlu menyusun strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu, dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan danketersediaan sumber pembiayaan.

Kebijakan yang perlu ditempuh agar tercapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan dan peningkatan infrastruktur
- 2) Pengembangan pusat pembenihan
- 3) Penyediaan peralatan dan sarana produksi
- 4) Penyediaan jaminan kredit bagi pembudidaya ikan dan perikanan tangkap
- 5) Peningkatan keterampilan pembudidaya ikan
- 6) Pengembangan kelembagaan kelompok perikanan
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh perikanan

4. Program

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah disusun. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait.

Ikhtisar masing-masing sasaran dan program dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4.

Sasaran dan Program Kegiatan Perikanan Tahun 2023

SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.888.783.846,00
			Administrasi umum perangkat daerah Administrasi	Belanja perjalanan dinas biasa	35 Laporan	195.053.208,00
				Penyedia bahan logistik kantor	1 Paket	40.000.000,00
				Penyedia Barang Cetakan dan penggandaan	1 Paket	8.000.000,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	14.300.000,00
2	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1). 50.505 ekor benih ikan Baung dan Patin 2). 86 unit Jala Tebar 3). 59 Unit Pukat dan 4). 31 Unit Mesin Ketinting	581.770.000,00

3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	12 Unit Usaha	12.547.000,00
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber daya Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan PembudidayaanIkan	Penjaminan Ketersediaan Sarana PembudidayaanIkan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	1). 880 Induk Ikan Baung, Gurame, Lele, Mas dan Nila 2). 250.000 Benih Ikan Mas, Patin, Nila Merah dan Lele 3). 20 Unit Kiolam Terpal	1.016.400.000,00
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1). 35.000 Benih Ikan Mas dan Nila Merah 2). 1 Unit Pompa Air Alkon 3). 1 Unit Pembuatan Dam Air 4). 10 Unit Pembuatan Kolam 5). 4 Unit Rehab Kolam 6). 1 Unit CCTV	900.000.000,00
				Penyedia Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00
			Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya Ikan kecil	Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	11 Kelompok	486.200.000,00
			TOTAL ANGGARAN TAHUN 2023			

Dari tabel di atas Dinas Perikanan pada tahun 2023 telah melaksanakan rencana kinerja dengan 4 (empat) Program dengan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 11 (Sebelas) Sub Kegiatan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dengan menetapkan target yang akan dicapai. Target yang ditetapkan merupakan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan 2021-2026. RencanaKinerja Tahunan yang ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada table 2.5.

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	193
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	72

Sumber : Data Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya

Untuk mendukung rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan disusunlah rumusan rencana program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 2.6:

Tabel 2.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun rencana)			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3.25	Urusan Pilihan					
3.25	Bidang Urusan Pemerintahan					
3.25.01	Program Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Penunjang Daerah				
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	SKPD	12 Bulan	3.888.783.846,00	APBD II
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	SKPD	35 Laporan	195.053.208,00	APBD II
		Jumlah Kebutuhan ATK	SKPD	1 Paket	40.000.000,00	APBD II
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	SKPD	1 Paket	8.000.000,00	APBD II

3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	SKPD	1 Unit	14.300.000,00	APBD II
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan diperairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Malinau	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II
		Jumlah alat tangkap ikan untuk nelayan tangkap	Kabupaten Malinau	176 Unit	581.770.000,00	APBD II
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan Bimbingan dan Pembinaan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Kabupaten Malinau	11 Unit Usaha	12.547.000,00	APBD II
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
3.25.04.2.02.04	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, erta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Malinau	11 Kelompok	486.200.000.00	APBD II
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	1.Jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Malinau	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD II
		2.Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Malinau	12 unit	900.000.000,00	APBD II Bankeu
		Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana	Kab.Malinau	20 Unit	1.016.400.000,00	APBD II

		Pembudidayaan nkan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota				
--	--	--	--	--	--	--

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanian Kinerja Tahunan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Penetapan Perjanjian Kinerja tahunan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	193 Ton
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	72 Ton

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 257.353.208,00	APBD
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.427.600.000,00	APBD
3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 581.770.000,00	APBD
Jumlah		Rp. 3.266.723.208,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yaitu laporan kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana Tingkat pencapaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Tingkat Capaian

=

Realisasi

Target

X 100%

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

Persentase Tingkat Capaian

=

Target - (Realisasi - Target)

Target

X 100%

Capaian kinerja Dinas Perikanan diukur dengan menggunakan rumus formulasi sebagai berikut :

Realisasi

Persentase Capaian Kinerja =

Target

x 100%

Untuk membuat kesimpulan hasil dari evaluasi kinerja dibuat skala - Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Intervasi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun Capaian Kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian %
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	193	258,82	134,10
		Produksi PerikananTangkap (Ton)	72	138,38	192,19
Rata rata Capaian					163,14

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya dan perikanan Tangkap

B. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan

pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 1 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*)

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*) melalui 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	193	258,82	134,10
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	72	138,38	192,19
Rata-rata capaian				163,14

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya dan perikanan Tangkap

Dari capaian indikator sasaran tersebut dapat ditunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Malinau masih dikategorikan sangat baik. Selama periode tahun 2023 Dinas Perikanan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapaisasaran yang telah ditetapkan.

1. Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan indikator kinerja sasaran “Produksi Perikanan Budidaya” terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 dengan target yang telah

ditetapkan di RENSTRA tahun 2021-2026 yaitu sebesar 193 ton dan terealisasi produksi perikanan budidaya 258,82 atau melebihi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 65,82 Ton, Dengan demikian capaian kinerja produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 134,10 % dengan hasil evaluasi kinerja dikategorikan Sangat Baik.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung produksi perikanan budidaya yaitu :

Realisasi Produksi Perikanan Budidaya

x 100%

Target Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

IKU/IndikatorKinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Vs 2021- 2022	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6 (4:3x100)	7 (5:3x100)
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	258,82	120	154,73	46,36	59,78

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya

Sebagai salah satu sumber protein hewani yang utama bagi masyarakat, ikan menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan system ketahanan pangan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran terhadap gizi dan kesehatan menyebabkan tingkat konsumsi ikan per kapita menjadi meningkat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani, maka pemerintah harus dapat menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan tabel 3.3 di atas tampak bahwa peningkatan realisasi kinerja terhadap indikator produksi perikanan budidaya bervariasi setiap tahunnya, yakni dari tahun 2023 terhadap tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi tahun 2023 sebesar 258,82

dengan realisasi tahun 2021 sebesar 120 atau realisasicapaian kinerja sebesar 46,36 % dan realisasi tahun 2022 sebesar 154,73 atau realisasicapaian kinerja sebesar 59,78 %. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 115,68% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 67,27% terhadap capaian tahun 2022

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengantarget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

IKU/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	258,82	222	116,58

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi produksi perikanan Budidaya tahun 2023 sebesar258,82 Ton dengan target Renstra tahun 2026 sebesar 222 Ton, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 116,58 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

a Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Budidaya perikanan adalah suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuartik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan. Devinisi lainnya adalah Upaya-upaya manusia untuk meningkatkan produktifitas perairan. Tujuannya untuk melestarikan sekaligus memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan budidaya biasanya dilakukan oleh peternak. Dan Manfaatnya memperoleh pendapatan ekonomi yang lebih baik.

Produksi Budidaya Perikanan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang di usahakan oleh rumah tangga Perikanan. Ada

beberapa Sarana Produksi Perikanan Budidaya yang sering digunakan oleh rumah tangga Perikanan yaitu antara lain :

- a. Benih, Benih adalah salah satu bahan penting pada budidaya ikan konsumsi
- b. Pakan. Pakan ialah asupan makanan yang harus diberikan pada ikan pada tiap harinya.
- c. Air. Air juga merupakan bahan yang penting dalam budidaya ikan
- d. Obat-obatan
- e. Kolam
- f. Bak

Dari tabel-tabel perbandingan di atas yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemamparan alternative solusi yang telah diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.

Dari tabel 3.4 capaian indikator produksi Perikanan Budidaya dari sasaran kinerja peningkatan Perikanan Budidaya untuk tahun 2023 mencapai sebanyak 258,82 ton atau capaian kinerja sebesar 116,58 % dari target yang telah ditetapkan di dalam Perubahan RENSTRA 2021-2026 sudah melebihi capaian. Adapun beberapa Faktor Pendorong Keberhasilan Produksi Perikanan Budidaya antara lain Yaitu :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat berupa bantuan Sarana dan Prasarana di Bidang Budidaya berupa Bantuan Pakan Ikan, Benih Ikan dan Waring;
2. SDM Aparatur yang berkualitas, Adanya Pendampingan dan Pendataan secara rutin baik Triwulan maupun Semester yang dilakukan oleh Petugas Lapangan (PPL);
3. Peningkatan dan penumbuhan kelompok pelaku usaha perikanan telah dilakukan secara kontinyu, berupa Penilaian Kelas Kelompok baik itu Tingkat Pemula, Madya hingga Utama.
4. Terjadi peningkatan ekonomi yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat pada produk perikanan.

Walaupun realisasi sudah melebihi target, tetapi masih ada permasalahan terhadap target produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2023 yang disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Faktor alam berupa terjadi bencana banjir;
2. Belum ada *stake holder* yang menampung hasil produksi Perikanan budidaya;
3. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perlakuan pasca produksi perikanan (Pengolahan Ikan);
4. Tingginya biaya produksi meliputi benih dan pakan yang semakin mahal;
5. Kekurangan Tenaga Penyuluh Lapangan.

Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling

tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tindak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki atau membangun sistem drainase yang baik untuk mengalirkan air hujan dengan efisien dan Menjaga keberlanjutan sungai dengan reboisasi di daerah aliran sungai dan pemeliharaan vegetasi.
2. Mendorong para pembudidaya ikan untuk dapat membentuk koperasi/Asosiasi untuk meningkatkan kekuatan tawar mereka dalam bernegosiasi dengan *stakeholder* potensial. Selain itu Koperasi dapat membantu dalam pemasaran bersama dan penjualan hasil produksi secara lebih efisien. Pembudidaya ikan dapat membentuk koperasi untuk meningkatkan kekuatan tawar mereka dalam bernegosiasi dengan *stakeholder* potensial.
3. Mengadakan program penyuluhan secara rutin untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang perlakuan pasca produksi perikanan, Selain itu juga Melibatkan ahli perikanan atau praktisi yang berkompeten dalam menyampaikan informasi yang akurat dan relevan.
4. Membentuk koperasi atau kelompok tani untuk melakukan pembelian bersama benih dan pakan dalam jumlah besar, sehingga dapat memperoleh harga lebih murah, Selain itu juga Menjalin kemitraan dengan pemasok benih dan pakan untuk mendapatkan diskon atau penawaran khusus.
5. Menerapkan teknologi informasi, seperti aplikasi seluler, platform daring, atau sistem SMS, untuk menyampaikan informasi perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan, melibatkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program pelatihan yang relevan. Selain itu juga bisa juga dengan cara mengembangkan strategi bersama untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh lapangan dan bisa juga dengan cara mengadopsi pendekatan berbasis kelompok dalam penyuluhan, di mana seorang penyuluh dapat bekerja dengan beberapa kelompok nelayan atau pembudidaya sekaligus.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja sebesar Rp. 2.174.711.278 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.427.600.000 atau capaian realisasi sebesar 89,58 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 134,10 %. Dengan menggunakan rumus perhitungan di atas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 252.888.722 atau sebesar 10,41 %.

Tabel 3.5
Laporan dan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bidang
Perikanan Budidaya Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.427.600.000,00	2.174.711.278,00	89,58
	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil			
	Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	486.200.000,00	423.540.352,00	87,11
	Penyedia Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	21.695.800,00	86,78
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	1.016.400.000,00	868.580.950,00	85,45
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000,00	860.894.176,00	95,65

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya

Efektifitas merupakan ukuran sejauhmana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Perencanaan SDM menentukan kualitas tenaga kerja dan kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan organisasi dalam periode tahunan. Jika dilakukan dengan baik, hal ini mampu menghasilkan tenaga kerja yang produktif, efisien dan sejalan dengan sasaran kinerja organisasi.

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang di nilai dari segi besarnya sumber daya manusia untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi SDM khususnya Bidang Budidaya Perikanan dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup, yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 sudah memadai.

Monitoring dan evaluasi (Monev) dalam bidang perikanan budidaya di Kabupaten Malinau merupakan proses yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aspek kegiatan budidaya perikanan di wilayah tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program-program yang terkait dengan budidaya perikanan di kabupaten tersebut.

Beberapa hal yang mungkin menjadi fokus dalam Monitoring dan evaluasi bidang perikanan budidaya di Kabupaten Malinau meliputi:

- a. Produksi Perikanan: Monitoring dan evaluasi akan memantau produksi ikan dan komoditas perikanan lainnya yang dibudidayakan di wilayah tersebut. Ini termasuk pemantauan pertumbuhan ikan, produktivitas kolam budidaya, serta jumlah dan kualitas hasil tangkapan.
- b. Kesehatan dan Kondisi Lingkungan: Penting untuk memantau kesehatan ikan dan kondisi lingkungan tempat budidaya perikanan berlangsung. Ini termasuk pemeriksaan terhadap kualitas air, kebersihan kolam, serta upaya pengendalian penyakit dan parasit yang mungkin memengaruhi produksi perikanan.
- c. Kesejahteraan Petani Perikanan: Monitoring dan evaluasi juga akan mengevaluasi dampak kegiatan budidaya perikanan terhadap kesejahteraan petani perikanan lokal. Ini meliputi aspek seperti pendapatan petani, akses terhadap sumber daya, serta ketersediaan pelatihan dan bantuan teknis.
- d. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Monitoring dan evaluasi juga akan memastikan bahwa kegiatan budidaya perikanan di Kabupaten Malinau beroperasi sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Ini termasuk aspek-aspek seperti izin usaha, pematuhan terhadap aturan lingkungan, dan perlindungan terhadap spesies yang dilindungi.

Dengan melakukan Monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengidentifikasi masalah, mengevaluasi efektivitas program, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk mendukung perkembangan dan keberlanjutan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Malinau.

 Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Petani Perikanan	 Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Produksi Perikanan
 Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Terhadap Regulasi	 Monitoring dan Evaluasi Kesehatan dan Kondisi Lingkungan

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset yang tak ternilai dalam setiap sektor pembangunan, tak terkecuali dalam konteks budidaya di Kabupaten Malinau. Dalam konteks pertanian perikanan, SDM memainkan peran krusial dalam menjaga kelangsungan dan pengembangan sektor ini.

Kabupaten Malinau, yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor budidaya perikanan sebagai salah satu pilar ekonomi lokal. Namun, keberhasilan budidaya perikanan tidak hanya ditentukan oleh potensi alam semata, tetapi juga oleh ketersediaan dan kualitas SDM yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Dalam konteks inilah pentingnya pemahaman yang mendalam tentang peran serta, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM dalam industri budidaya perikanan di Kabupaten Malinau. Dengan pengetahuan yang tepat, keterampilan yang memadai, dan komitmen yang kuat, SDM dapat menjadi penggerak utama bagi kemajuan sektor ini.

Tabel 3.6
Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Budidaya Perikanan Kabupaten Malinau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1	SLTA	1	-	1
2	Sarjana Muda(D-3)	2	-	2
3	Sarjana (S-1)	4	-	4
Jumlah		7	-	7

Sumber : Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Tahun 2023

Efisiensi SDM tidak hanya mengatur jumlah tenaga kerja di setiap posisi. Namun efisiensi SDM juga tentang seluruh aspek usaha yang ada di dalam suatu usaha. Dapat di asumsikan jika produktifitas sumber daya manusia tinggi, maka efisiensinya juga akan tinggi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salahsatu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA(%)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	134,10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan a. Penyedia data dan informasi pembudidayaanikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	89,58 %

Sumber : DPA Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Dari tabel 3.7 di atas, indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan untuk usaha pencapaiannya. Pada tahun 2023 dengan pencapaian indikator kinerja Produksi Perikanan Budidaya dengan realisasi keuangan 89,58 %. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Perikanan Budidaya adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Dari tabel 3.5 dapat dilihat rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut : Program pengelola Perikanan Budidaya. Indikator *outcome* pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 100% dengan kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

- Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Target anggaran dalam Renstra sebesar Rp105.000.000,00 dan terealisasi pagu DPA Rp486.200.000,00 dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 423.540.352,00 atau 87,11 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.8
Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Sub Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan I	APBD II	486.200.000,00	423.540.352,00	100	87,11

Sumber : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- Sub Kegiatan Penyedia Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1(Satu) daerah Kabupaten/Kota .
Target anggaran dalam Renstra sebesar Rp25.000.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp25.000.000,00 dari pagu anggaran tersebut terserap Rp21.695.800,00 atau 86,78 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.9

Sub Kegiatan Penyedia data dan informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu)daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik(%)	Keu(%)
1	Sub Kegiatan Penyedia data dan informasi PembudidayaanIkan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	APBD II	25.000.000,00	21.695.800,00	100	86.78

Sumber : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



- Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 815.000.000,00,- dan terealisasi pagu DPA Rp1.016.400.000,00 dari pagu anggaran tersebut terserap Rp868.580.950,00 atau 85,45 % dan dengan fisik kegiatan terealisasi 100%.

Tabel 3.10

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1(Satu) daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	SumberDana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik(%)	Keu (%)
1	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1(Satu) daerah Kabupaten/Kota	APBD II	Rp1.016.400.000,00	Rp868.580.950,00	100	85,45

Gambar 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran



Sumber : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



2. Produksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan indikator kinerja sasaran “Produksi Perikanan Tangkap” terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan di RENSTRA tahun 2021-2026 yaitu sebesar 72 ton dan terealisasi produksi perikanan tangkap 138,38 ton atau melebihi target sebanyak 66,38 Ton, ini terlihat bahwa target produksi terpenuhi dengan capaian 192,19 % dengan hasil evaluasi kinerja dikategorikan Sangat Berhasil.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung produksi perikanan tangkap yaitu :

Realisasi Produksi Perikanan Tangkap

Target Produksi Perikanan Tangkap

x 100%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

IKU/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 VsTahun 2022	
			2021	2022	2021 (4:3x100)	2022 (5:3x100)
1	2	3	4	5	6	7
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	138,38	96,8	97,54	69,95	70,48

Sebagai salah satu sumber protein hewani yang utama bagi masyarakat, ikan menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan system ketahanan pangan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran terhadap gizi dan kesehatan menyebabkan tingkat konsumsi ikan per kapita menjadi meningkat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani, maka pemerintah harus dapat menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas tampak bahwa peningkatan realisasi kinerja terhadap indikator produksi Perikanan Tangkap bervariasi setiap tahunnya, yakni dari tahun 2023 terhadap tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap sebesar 138,38 ton, dengan realisasi tahun 2021 sebesar 96,8 ton atau realisasi capaian kinerja sebesar 69,95 % dan realisasi tahun 2022 sebesar 97,54 ton atau realisasi capaian kinerja sebesar 70,48 % dengan demikian, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 42,95 % terhadap capaian tahun 2021 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 42,95 % terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun 2023 Dengan Target
Jangka Menengah

IKU/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target 2026
1	2	3	4	7
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	138,38	78	192,19

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar138,38 ton dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 78 ton, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 192,19 % terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

a Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan

Dari tabel perbandingan di atas yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemamparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Dari tabel 3.12 di atas capaian indikator peningkatan perikanan tangkap untuk tahun 2023 produksi perikanan tangkap mencapai sebanyak 138,38 ton atau capaian kinerja sebesar 192,19 % dari target yang telah ditetapkan di dalam Perubahan RENSTRA 2021-2026 sudah Melebihi capai, Ada beberapa faktor pendorong tercapainya produksi perikanan tangkap antara lain yaitu :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat yaitu bantuan sarana dan prasarana di Bidang Perikanan Tangkap berupa Bantuan Alat Mesin Penggerak Perahu Nelayan, Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan Hal ini juga Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malinau.
2. SDM Aparatur yang berkualitas, adanya pendampingan dan pendataan secara rutin baik Triwulan maupun Semester yang dilakukan oleh Petugas Lapangan (PPL)
3. Peningkatan dan penumbuhan kelompok Nelayan Khususnya Pada Bidang Usaha Perikanan Tangkap telah dilakukan sosialisasi akan pentingnya kelembagaan dan sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.
4. Pengaktifan Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan dan pemberian bantuan berupa Sarana dan Prasarana Mesin dan Perahu Pengawas Perairan, Pemasangan Plang

Peringatan Larangan Menggunakan Alat Tangkap tidak Ramah Lingkungan.

Walaupun target sudah melebihi capaian tetap juga ada permasalahan terhadap target produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2023 yang disebabkan beberapa factor yaitu :

1. *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*: Penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dapat merusak stok ikan secara tidak terkontrol, merugikan nelayan yang mematuhi peraturan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Masalah Teknologi : penggunaan teknologi tangkapan yang tidak ramah lingkungan atau tidak berkelanjutan, seperti alat tangkap yang tidak selektif, dapat menyebabkan penangkapan yang tidak efisien dan merugikan lingkungan.
3. Kurangnya Infrastruktur dan akses pasar : kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan, serta akses pasar yang terbatas bagi nelayan, dapat menghambat pengembangan industri perikanan tangkap.
4. Fluktuasi Harga: Fluktuasi harga ikan dapat mempengaruhi daya beli nelayan dan mendorong praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
5. Kekurangan Tenaga Penyuluh Lapangan.

Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi Tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tindak lanjut Upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Pemberdayaan Komunitas Nelayan : mendorong partisipasi aktif nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya perikanan, selain itu juga dapat melakukan program edukasi dan pelatihan kepada nelayan tentang praktik perikanan yang berkelanjutan, serta menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya perikanan.
2. Regulasi yang ketat : Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan penggunaan teknologi tangkapan. Hal ini mencakup larangan atau pembatasan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau tidak selektif, selain itu juga pemerintah dapat Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan tentang praktik perikanan yang berkelanjutan dan dampak negatif dari penggunaan teknologi tangkapan yang tidak ramah lingkungan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pelestarian lingkungan.
3. a. Pengembangan Infrastruktur:

Pemerintah perlu menginvestasikan dalam pengembangan infrastruktur yang

mendukung kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan, seperti pelabuhan, dermaga, pusat pengolahan ikan, dan fasilitas penyimpanan yang memadai.

b. Pelatihan dan Pendampingan:

Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan dalam pengelolaan bisnis, pemasaran, dan manajemen keuangan dapat membantu meningkatkan keterampilan mereka dalam memasarkan produk perikanan dan mengelola usaha secara efektif.

c. Akses Keuangan:

Memberikan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan dan kredit bagi nelayan untuk pengembangan infrastruktur dan pembelian teknologi pengolahan yang diperlukan.

d. Pendekatan Berbasis Masyarakat:

Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi pengembangan infrastruktur dan pemasaran dapat memastikan bahwa solusi yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

e. a. Pendidikan tentang Keberlanjutan: Memberikan pendidikan dan informasi kepada nelayan tentang pentingnya praktik perikanan yang berkelanjutan dapat membantu mengubah perilaku mereka dalam menanggapi fluktuasi harga, sehingga mereka lebih memilih praktik yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

b. Kooperasi Nelayan: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok nelayan dapat membantu meningkatkan kekuatan tawar nelayan dalam menetapkan harga jual hasil tangkapan mereka.

c. Asuransi atau Perlindungan Risiko: Menerapkan program asuransi atau perlindungan risiko untuk nelayan dapat membantu melindungi mereka dari kerugian finansial akibat fluktuasi harga atau kejadian tak terduga lainnya.

d. Pelatihan Manajemen Keuangan: Memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan kepada nelayan untuk membantu mereka mengelola pendapatan mereka secara efisien, mengantisipasi fluktuasi harga, dan merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik.

f. a. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam penyuluhan dan pembangunan industri perikanan tangkap dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga penyuluh lapangan. Ini bisa dilakukan melalui pelibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam program penyuluhan dan pengembangan kapasitas lokal.

b. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi seperti aplikasi seluler atau

platform online untuk memberikan penyuluhan secara efisien dan terukur dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga penyuluh lapangan. Teknologi juga dapat digunakan untuk memberikan pelatihan jarak jauh kepada nelayan dan petani perikanan.

- c. Peningkatan Keterlibatan Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah dapat aktif terlibat dalam pengembangan perikanan tangkap di wilayah mereka dengan menyediakan dukungan dan fasilitas bagi tenaga penyuluh lapangan, serta memperkuat sistem koordinasi antara berbagai pihak terkait.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

- 1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
- 2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$Persentase Efisiensi Biaya = 100\% - \frac{Realisasi Anggaran}{Target Anggaran} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 Realisasi Penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja sebesar Rp. 579.803.900 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 581,770.000 atau capaian realisasi sebesar 99,66 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 192,19 % dengan menggunakan rumus perhitungan di atas, maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 1.966.100 atau sebesar 0,33 %

Tabel 3.13
 Laporan dan Realisasi Anggaran Per Program,Kegiatan dan Sub kegiatan
 Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakandalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	581.770.000,00	579.803.900,00	99,66

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap

Efektifitas merupakan ukuran sejauhmana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya. Perencanaan SDM menentukan kualitas tenaga kerja dan kontribusi mereka dalam pencapain tujuan organisasi dalam periode tahunan. Jika dilakukan dengan baik, hal ini mampu menghasilkan tenaga kerja yang produktif, efisien dan sejalan dengan sasaran kinerja organisasi.

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang di nilai dari segi besarnya sumber daya manusia untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi SDM khususnya Bidang Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup, yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 sudah memadai.

Monitoring dan evaluasi (Monev) dalam bidang Usaha Perikanan di Kabupaten Malinau merupakan proses yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aspek kegiatan Usaha perikanan di wilayah tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program-program yang terkait dengan Usaha perikanan di kabupaten Malinau.

Beberapa hal yang mungkin menjadi fokus dalam Monitoring dan evaluasi bidang Usaha Perikanan di Kabupaten Malinau meliputi:

1. Produksi Ikan: Memantau produksi ikan dari perikanan tangkap dan budidaya ikan di wilayah tersebut. Ini mencakup jumlah dan jenis ikan yang ditangkap atau diproduksi, serta tren produksi dari waktu ke waktu.

2. Kondisi Sumber Daya: Memantau kondisi populasi ikan dan ekosistem perairan, termasuk keberlanjutan populasi ikan yang ditangkap, kondisi habitat ikan, dan keberadaan spesies invasif atau terancam punah.
3. Efektivitas Alat Tangkap: Evaluasi efektivitas alat tangkap yang digunakan dalam perikanan tangkap, termasuk penilaian terhadap penangkapan sasaran dan penangkapan sampingan (bycatch), serta dampaknya terhadap lingkungan.
4. Kesejahteraan Nelayan: Memantau kesejahteraan nelayan dan komunitas pesisir, termasuk pendapatan, kondisi sosial, dan akses terhadap layanan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan.
5. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan, termasuk pembatasan musim penangkapan, ukuran minimum ikan yang dapat ditangkap, dan kuota tangkapan, serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam mencapai tujuan konservasi dan pengelolaan.
6. Pengaruh Perubahan Iklim: Memahami dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan, termasuk peningkatan suhu air laut, perubahan pola cuaca, dan kenaikan permukaan air laut, serta strategi adaptasi yang diperlukan.
7. Partisipasi Masyarakat: Menilai tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan, serta efektivitas program partisipatif dalam mencapai tujuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
8. Pengembangan Usaha: Memantau perkembangan usaha perikanan lokal, termasuk pengembangan usaha kecil dan menengah, promosi nilai tambah produk perikanan, dan diversifikasi usaha perikanan.
9. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memantau aktivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran peraturan perikanan, termasuk penangkapan ilegal, pencurian ikan, dan praktik perikanan yang merusak lingkungan.

Dengan melakukan Monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengidentifikasi masalah, mengevaluasi efektivitas program, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk mendukung perkembangan dan keberlanjutan sektor Usaha perikanan di Kabupaten Malinau.

 Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Nelayan	 Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Alat Tangkap
 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Penegakan Hukum	 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha
 Monitoring dan Evaluasi Pengaruh Perubahan Iklim	 Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Masyarakat

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset yang tak ternilai dalam setiap sektor pembangunan, tak terkecuali dalam konteks Usaha Perikanan di Kabupaten Malinau. Dalam konteks pertanian perikanan, SDM memainkan peran krusial dalam menjaga kelangsungan dan pengembangan sektor ini.

Kabupaten Malinau, yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor Usaha perikanan sebagai salah satu pilar ekonomi lokal. Namun, keberhasilan Usaha perikanan tidak hanya ditentukan oleh potensi alam semata, tetapi juga oleh ketersediaan dan kualitas SDM yang terlibat dalam

aktivitas tersebut.

Dalam konteks inilah pentingnya pemahaman yang mendalam tentang peran serta, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM dalam industri Usaha perikanan di Kabupaten Malinau. Dengan pengetahuan yang tepat, keterampilan yang memadai, dan komitmen yang kuat, SDM dapat menjadi penggerak utama bagi kemajuan sektor ini.

Tabel 3.14
Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Malinau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	SLTA	1	-	1
3.	Sarjana Muda (D-3)	1	-	1
4.	Sarjana (S-1)	1	-	1
5.	Sarjana (S-2)	3	-	3
Jumlah				6

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2023

Efisiensi SDM khususnya Bidang Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang, yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 sudah memadai. EfektivitasSDM cukup memuaskan, yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukandan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salahsatu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (TON)	PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	192,19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	99,66

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap

Dari tabel 3.15 di atas, indikator kinerja didukung dengan beberapa program dan kegiatan untuk usaha pencapaiannya. Pada tahun 2023 dengan pencapaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap sebesar 138,38 ton atau sebesar 192,19 %. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut di atas adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan sumber pendanaan dari APBD.

Dari tabel 3.15. dapat dilihat rincian masing - masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Program pengelola Perikanan Tangkap

Indikator *outcome* pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 100% dengan kegiatan penunjang sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota

Target anggaran dalam Renstra sebesar Rp525.000.000,00 dan terealisasi pagu DPA Rp581.770.000,00 dari pagu anggaran tersebut terserap Rp579.803.900,00 atau 99,66 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.16
Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap Ikan

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sunag, Danau, Waduk, Rawadan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota	APBD II	581.770.000,00	579.803.900,00	100	99,66

Gambar 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran



C . Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan-pelaksanaan Program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3.17
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perikanan kabupaten Malinau
Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	3.266.723.208,00	3.005.204.725	91,99

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi Anggaran Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2023 sebesar Rp7.168.054.054,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp6.666.803.731,00 atau sebesar 93%.

Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Malinau terdiri dari 2 (Dua) jenis Belanja yaitu belanja Operasional dan Belanja Modal. Untuk perincian tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18

Laporan dan Realisasi Anggaran Per Program,Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Program PenunjangUrusan Pemerintah kabupaten/Kota			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub KegiatanPenyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.888.783.846,00	3.649.541.506,00	93,84
	Kegiatan AdministrasiUmum Perangkat Daerah			
	Sub KegiatanPenyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	39.629.500,00	99,07
	Penyelenggaraan Rapat, koordinasi dankonsultasi skpd	195.053.208,00	192.946.047,00	98,91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	7.821.000,00	97,76
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.300.000,00	10.293.000,00	71,97
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakandalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap	581.770.000,00	579.803.900,00	99,66
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil			

	Pemberian Pendampingan, kemudahan AksesIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	486.200.000,00	423.540.352,00	87,11
	Penyedia Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	21.695.800,00	86,78
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	1.016.400.000,00	868.580.950,00	85,45
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	900.000.000,00	860.894.176,00	95,65
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	12.547.000,00	12.057.500,00	96.09

Tabel 3.19
 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE
Belanja Daerah	7.168.054.054,00	6.666.803.731,00	93,00
1.Belanja Operasional	6.831.770.054,00	6.364.599.731,00	93,16
a.Belanja Pegawai	3.896.173.846,00	3.649.541.506,00	93,66
b.Belanja Barang dan Jasa	2.935.596.208,00	2.715.058.225,00	92,48
2. Belanja Modal	336.284.000,00	302.204.000,00	89,86
Belanja Modal Tanah	196.028.000,00	195.048.000,00	99,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.256.000,00	107.156.000,00	76,40

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Permentan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pencapaian sasaran/target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau tahun 2023 belum sepenuhnya terwujud dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Faktor Internal berkaitan dengan :

- a. Dinas Perikanan merupakan Perangkat Daerah (PD) yang baru terbentuk di awal Januari 2017;
- b. Masih rendahnya pemahaman dan penerapan tugas pokok dan fungsi oleh masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran pembangunan sektor perikanan;
- c. Masih minimnya tenaga Penyuluh Perikanan;
- d. Belum optimalnya peran dan fungsi BBI.

2. Faktor Eksternal diantaranya adalah :

- a. Masih tingginya harapan para pembudidaya ikan terhadap bantuan baik berupa stimulan maupun benih ikan dan pakan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Masih kurangnya minat para usia produktif/pemuda untuk bergerak di bidang usaha budidaya;
- c. Pola Budidaya Perikanan oleh masyarakat di Kabupaten Malinau masih bergantung dengan warisan budaya/kebiasaan turun temurun menyebabkan produktivitas hasil perikanan masih rendah;
- d. Profesi sebagai pembudidaya ikan dan nelayan masih sebagian besar bersifat usaha sampingan (bukan usaha pokok) sehingga produksi dan produktivitas hasil perikanan fluktuatif sangat bergantung dengan intervensi pemerintah berupa alokasi anggaran terkait;
- e. Sarana dan prasarana nelayan yang masih minim;
- f. Berkurangnya populasi ikan di perairan umum yang diakibatkan pencemaran dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan

- (penggunaan racun dan setrum);
- g. Harga barang produk perikanan dari luar lebih murah;
- h. Pengawasan perairan umum yang belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau akan mengupayakan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan fungsi dan peran Dinas Perikanan di tengah keterbatasan anggaran;
2. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada seluruh pembudidaya perikanan termasuk para pemuda untuk bergerak berusaha pada sektor perikanan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran BBI Kaliamok;
4. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil tangkap perikanan;
5. Mengupayakan agar tersedia PPL Perikanan yang saat ini hanya ada 2 (dua) PPL dari pusat;
6. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Perikanan;
7. Peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok pembudidaya dan nelayan melalui penilaian kemampuan kelompok pembudidaya dan nelayan secara rutin;
8. Melaksanakan koordinasi Instansi terkait dengan memperketat pengawasan amdal dan perusahaan tambang/industri yang membuang air limbah ke sungai;
9. Mengkampanyekan kali/sungai bersih;
10. Melaksanakan *restocking* benih ikan air tawar;

Melaksanakan koordinasi dengan DKP Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan pengawasan, pengolahan dan pemasaran.

B. Rekomendasi LHE Sakip

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh inspektorat dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja telah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

Matrik Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023
Terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas
Perikanan Tahun 2022

NO	REKOMENDASI
1	Dokumen Perencanaan agar sesuaikan untuk Pohon Masalah, Pohon Kinerja,Perbaiki data Capaian pada Renstra
2	Dokumen Perencanaan Landasan Hukum pada Renstra agar memakai peraturan yang terbaru dan Renja Menyesuaikan
3	Agar masing-masing Unit kerja selalu merumuskan dan Menetapkan Perencanaan Kinerja
4	Agar memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan Menyusun rencana aksi kinerja dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.
5	Menyusun Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data Kinerja
6	Menyusun definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja
7	Menetapkan Mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan atau standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja

Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut telah dilakukan Langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan sebagai berikut:

Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023
Terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas
Perikanan Tahun 2022

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Dokumen Perencanaan agar sesuaikan untuk Pohon Masalah, Pohon Kinerja,Perbaiki data Capaian pada Renstra	Telah di lakukan Perbaikan Pohon Masalah, Pohon Kinerja dan Capaian pada Renstra 2021-2026 sesuai rekomendasi LHE	Sudah dilaksanakan

		Sakip Nomor 700/38/REV- SAKIP/EVASLAP Tertanggal 29 Maret 2023	
2	Dokumen Perencanaan Landasan Hukum pada Renstra agar memakai peraturan yang terbaru dan Renja Menyesuaikan	Telah dilakukan Perbaikan Landasan Hukum pada Renstra memakai Peraturan Terbaru	Sudah dilaksanakan
3	Agar masing-masing Unit kerja selalu merumuskan dan Menetapkan Perencanaan Kinerja	Merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja sudah dilakukan OPD	Sudah dilaksanakan
4	Agar memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan Menyusun rencana aksi kinerja dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.	Telah dilakukan Menyusun Rencana Aksi Kinerja dan Melakukan Pemantauan Capaian Kinerja secara berkala	Sudah dilaksanakan
5	Menyusun Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data Kinerja	Telah dilakukan Menyusun Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Sudah dilaksanakan
6	Menyusun definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja	Telah dilakukan Penyusunan dedfinisi Operasional dan Cara mengukur Indikator Kinerja	Telah dilaksanakan
7	Menetapkan Mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan atau standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja	Telah dilakukan standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja	Telah dilaksanakan

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan kinerja pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel dan berkualitas sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera, dengan ditopang oleh program dan kegiatan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Malinau, 31 Pebruari 2024
Kepala Dinas Perikanan



Muhammad Kadri, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19670717 199803 1 004